**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA BANK**

(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2015-2016)

Skripsi

Ditulis Oleh :

Nama : Purwati

Nomor Mahasiswa : 173216487

Jurusan : Akuntansi

Bidang Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2019

**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA BANK**

(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2015-2016)

Skripsi

Ditulis Dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata-1 Di Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha

Ditulis Oleh :

Nama : Purwati

Nomor Mahasiswa : 173216487

Jurusan : Akuntansi

Bidang Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2019

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Purwati

Nomor Mahasiswa : 173218487

Jurusan : Akuntansi

Bidang Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Mekanisme Good Corporate Terhadap Kinerja Bank yang di bombing oleh Bapak DRS Mudasetia Hamid , MM, Ak adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

Peneliti

Purwati

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purwati

Nomor Mahasiswa : 173216487

Jurusan : Akuntansi

Bidang Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

Judul skripsi : Pengaruh Mekanisme Good Corporate Terhadap Kinerja Bank

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan disajikan dalam sidang ujian skripsi Sarjana tanggal

Yogyakarta,

Telah di setujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

Drs. Mudasetia Hamid ,MM,Ak

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Telah dipertahankan/ diujikan dan disahkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 program studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha

Nama : Purwati

Nomor Mahasiswa : 173216487

Program Studi : Akuntansi

Bidang Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

Yogyakarta,

Disahkan oleh

Penguji / Pembimbing skripsi

Penguji 1 :

Penguji 2 :

Mengetahui

Ketua STIE Widya Wiwaha

Drs.Muhammad Subkhan,MM

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank” dengan studi kasus pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2015-2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan masing-masing komponen mekanisme tata kelola perusahaan yang terdiri dari mekanisme pemantauan kepemilikan serta control internal dan regulator dengan kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan ROE. Obyek penelitiannya adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015 dan 2016. Sampel perusahaan dipilih berdasarkan *purposive sampling*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya mekanisme pemantauan regulator yang secara signifikan berhubungan negatif dengan kinerja keuangan perbankan. Hal lain yang ditemukan adalah *gender diversity* dan ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan mekanisme tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan.

Kata kunci : GCG, mekanisme tata kelola perusahaan, kinerja perusahaan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrokhim

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan berkat rahmat-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Bank dapat terselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada :

1. Ibu Sopingah selaku orang tua yang telah merawat , mendampingi dari kecil hingga dewasa dan memberikan kasih sayang, semangat, doa, serta pendidikan yang tidak terhitung nilainya.
2. Madyani, Attha Mawlana Thoriq dan A. Sekar Kinanti yang selalu menjadi semangat memberikan doa dan dukungannya.
3. Bapak Drs Muda setia Hamid MM Ak. selaku dosen pembimbing materi dan teknis yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs.Muhammad Subkhan,MM selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.
5. Ibu Khoirunisa Cahya Firdarini, SE, M.Si selaku ketua jurusan Akuntansi.
6. Teman-teman RSUP DR Sardjito yang telah memberikan dukungan dan doa.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.
8. Teman-teman kelas Akuntansi angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan dukungannya selama ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu saya mengharapkan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Harapan saya semoga penulisan skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat dengan baik.

Yogyakarta,

Saya

Purwati

**STIE Widya Wiwana
Jangan Plagiat**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	6
1.3 Pertanyaan penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Tata Kelola Perusahaan.....	9
2.2 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan.....	12
2.3 Mekanisme Tata Kelola Perusahaan.....	15
2.4 Manfaat dan Tujuan Tata Kelola Perusahaan	23
2.5 Pedoman Perilaku Corporate Governance pada Perbankan.....	24
2.6 Kinerja Perbankan.....	28
2.7 Gender Diversity.....	33
2.8 Ukuran Perusahaan.....	34
2.9 Penelitian Terdahulu.....	34
2.10 Kerangka pemikiran.....	42
2.11 Pengembangan Hipotesis.....	46
BAB III METODA PENELITIAN	48
3.1 Jenis Penelitian.....	48
3.2 Variabel Penelitian.....	48
3.3 Populasi Dan Sampel.....	50

3.4 Jenis dan Sumber Data.....	51
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	52
3.6 Definisi Operasional Variabel.....	53
3.7 Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	65
4.2 Analisis Data.....	66
4.3 Analisis Regresi.....	58
4.4 4.4 Pembahasan.....	78
BAB V PENUTUP	87
KESIMPULAN.....	87
SARAN.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Public Supervision dan Enforcement</i> Indonesia.....	22
Tabel 2.2 Pedoman Pokok Pelaksanaan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	25
Tabel 2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3.1 Pemilihan sampel penelitian.....	51
Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian.....	54
Tabel 3.3 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi.....	59
Tabel 4.1 Daftar Perusahaan Perbankan yang Menjadi Sampel Penelitian Periode 2011-2015.....	65
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	66
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Dummy (Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Pemerintah).....	68
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas.....	70
Tabel 4.5 Hasil Uji multikolinearitas.....	73
Tabel 4.6 Hasil uji Autokorelasi.....	74
Tabel 4.7 Durbin-Watson Test.....	75
Tabel 4.8 Nilai R dan Koefisien Determinasi.....	76
Tabel 4.9 Hasil uji statistik F.....	77
Tabel 4.10 Output Persamaan Regresi.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme tata kelola Perusahaan.....	16
Gambar 2.2 Kerangka pemikiran penelitian.....	46
Gambar 4.1 Histogram ROE.....	71
Gambar 4.2 Grafik normal P-P Plot of Regression Standardized Residual.....	71
Gambar 4.3 Hasil uji Heteroskedasis.....	72

STIE Widya Wiwana
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Untuk mendapatkan kinerja optimal diperlukan suasana kerja dan hubungan antar pihak dalam organisasi yang selaras dan serasi. Hubungan ini dapat tergambar dari praktek tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan berfokus pada bagaimana cara semua pihak didalam perusahaan, termasuk didalamnya *stakeholders*, untuk memastikan manajer dan orang yang berasal dari dalam perusahaan lainnya senantiasa memiliki alat ukur yang jelas atau mengadaptasi mekanisme untuk menjaga *interest stakeholders* (Waseem, 2011: 65).

Secara umum, tata kelola perusahaan merupakan suatu struktur yang diterapkan agar perusahaan dapat semakin berkembang dan terus meningkatkan kinerja dengan didasari oleh perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Sebagaimana yang dijelaskan oleh *Forum of Corporate Governance Indonesia* (2016) bahwa definisi *Good Corporate Governance (GCG)* menurut *Cadbury Committee of United Kingdom* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan.

Pada tahun 2000-an tuntutan untuk penegakan tata kelola yang baik semakin besar. Masyarakat Transparansi Indonesia bersama dengan para ahli dan pihak terkait lainnya membentuk lembaga swasta yang melakukan riset,

mensosialisasikan konsep, praktik, manfaat dan pemeringkatan terhadap pengimplemantasian GCG kepada dunia usaha. Lembaga tersebut antara lain, *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, *Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD)*, *Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI)*, Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), LKDI (Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia) dan sampai akhirnya pada tahun 2011 terbentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Semua lembaga diatas bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari pratek *corporate governance* yang baik.

Adanya lembaga-lembaga tersebut diatas jelas membantu untuk penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia, dibuktikan dengan penelitian selanjutnya pada tahun 2014 mengenai perbandingan peningkatan kinerja *corporate governance* yang dilakukan oleh ADB.

Peningkatan Kinerja *Corporate Governance* Perusahaan Indonesia 2012-2013 dengan hasil penelitian tersebut Indonesia mengalami peningkatan yang positif pada 2012-2013 tetapi jika dibandingkan dengan dengan negara lain seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam dan Thailand, Indonesia masih berada pada level rendah. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan *Press Release Risk And Governance Summit 2014*, "*Passion to Governance: Implementing Strategy into Action*" yang diterbitkan oleh OJK, *Global Fraud Survey (2014)* menjelaskan bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya seperti penelitian tahun-tahun sebelumnya tetap menjadi sektor terbesar dimana *fraud* terjadi. Dengan demikian maka kesadaran untuk penerapan tata kelola perusahaan secara efektif di industri jasa keuangan perlu dilakukan secara lebih

sistematis, terus menerus, menunjukkan manfaat nyata, implementatif, dan tidak hanya ditataran konsep atau peraturan lagi, jauh secara spesifik diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia sendiri untuk perbankan *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Semua peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau instansi terkait yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan merupakan peraturan yang harus diterapkan pada setiap perbankan. Ditambah lagi dengan adanya OJK pada 2011 yang memiliki otoritas atas sektor jasa keuangan di Indonesia secara legal.

Tidak ada perlakuan istimewa untuk perbankan tertentu, sehingga semua bank seharusnya memiliki penerapan tata kelola perusahaan yang sama. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan keinginan terciptanya kondisi yang sehat dan juga operasional yang baik meskipun di dalam industri memiliki ukuran perusahaan yang berbeda. Berangkat dari perbedaan tersebut akan cenderung menciptakan budaya, efektifitas kerja, dorongan finansial, minat investor dan tentunya mekanisme tata kelola perusahaan yang berbeda pula. Mekanisme tata kelola perusahaan tentunya sangat penting karena mempengaruhi tingkat *competitive advantage* berujung pada kinerja perbankan

itu sendiri.

Penelitian mengenai mekanisme tata kelola perusahaan dan kinerja telah banyak dilakukan. Tetapi belum menjadi umum ketika melihat lebih dekat bagaimana ukuran perusahaan dan *gender diversity* mempengaruhi hubungan antara keduanya secara lemah atau lebih kuat. Ukuran perusahaan cenderung menggambarkan nilai perusahaan. Ketika ukuran perusahaan semakin besar kecenderungan untuk mendapatkan peluang pertumbuhan akan setara, selain itu perusahaan akan cenderung lebih diperhatikan oleh masyarakat. Dalam hal *gender diversity* bisa mempengaruhi kinerja dikarenakan perdebatan cara pandang terhadap kemungkinan perubahan dan gaya kepemimpinan dalam perusahaan. Secara subjektif kebanyakan orang menganggap bahwa wanita cenderung menggunakan perasaan, terstruktur dan juga rapi dalam bekerja sementara itu pria cenderung berusaha untuk berfikir lebih objektif dalam bertindak sehingga terlihat lebih tenang.

Melihat kondisi tersebut, maka peneliti tertarik melihat lebih dekat apakah ada pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta melihat pengaruh moderasi *gender diversity* dan ukuran perusahaan dengan melakukan penelitian berjudul: **Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank** (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2016).

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat pengaruh mekanisme tata kelola bank dengan kinerja perbankan di Indonesia yang meliputi mekanisme pemantauan kepemilikan, mekanisme pemantauan pengendalian internal, mekanisme pemantauan regulator dan mekanisme pemantauan pengungkapan.
- b. Adanya *gender diversity* pada dewan komisaris yang memoderasi mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan.
- c. Adanya ukuran perusahaan yang memoderasi mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan.

1.3 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitiannya adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh mekanisme tata kelola bank yang meliputi mekanisme pemantauan kepemilikan, mekanisme pemantauan pengendalian internal, mekanisme pemantauan regulator dan mekanisme pemantauan pengungkapan dengan kinerja perbankan di Indonesia?
2. Apakah *gender diversity* pada dewan komisaris memoderasi mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan?
3. Apakah ukuran perusahaan memoderasi mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dan kinerja perusahaan, meliputi mekanisme pemantauan kepemilikan, mekanisme pemantauan pengendalian internal, mekanisme pemantauan regulator dan mekanisme pemantauan pengungkapan dalam industri perbankan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui apakah tingkat keanekaragaman pada dewan komisaris memoderasi mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan Indonesia.
- c. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan memoderasi mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan Indonesia.

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Perbankan

Mengetahui mekanisme *Good Corporate Governance* pada perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik atau belum dan juga membantu direksi menjabarkan kerangka dalam menetapkan kebijakan ataupun keputusan stratejik.

- b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi

untuk meningkatkan analisis yang baik tentang perbandingan mekanisme *Good Corporate Governance* pada industri perbankan Indonesia. Serta, memberi kontribusi sebagai bahan kajian dan referensi untuk penelitian sejenis.

c. Bagi Praktisi

Dipraktekkan dan dipertimbangkan sebagai salah satu sarana perusahaan untuk mencapai kinerja perusahaan yang tinggi sesuai dengan harapan sehingga bisa menjadi kiblat dalam standar prosedur yang memiliki kualitas yang tinggi sehingga tercapainya keunggulan kompetitif.

STIE Widya Winwaha
Jangan Plagiat

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tata Kelola Perusahaan

Pengertian tata kelola perusahaan bisa ditemukan dalam berbagai penjelasan. Tetapi pada dasarnya tata kelola perusahaan berfokus pada bagaimana cara semua pihak didalam organisasi termasuk *stakeholders* untuk memastikan manajer dan individu lainnya yang ada dalam organisasi untuk selalu memiliki alat ukur yang jelas atau mengadaptasi mekanisme untuk menjaga ketertarikan dari *stakeholder* (Waseem, 2011: 43).

Selain itu tata kelola perusahaan secara sederhana dilihat sebagai prosedur dan proses yang sesuai dengan arahan dan kontrol dari masing-masing perusahaan (OECD, 2004:65). Tata keola perusahaan merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya (OECD, 2004). Tata kelola perusahaan bisa juga dilihat sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain (IICG, 2015:40).

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER—01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara menekankan kewajiban

bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Sementara itu BPKP (2015:52) mendefinisikan tata kelola perusahaan melalui *soft definition* yang mudah dicerna, sekalipun oleh orang awam, yaitu: “*komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika*”.

Sekarang ini tata kelola perusahaan yang baik lebih dikenal sebagai suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum). Hampir seluruh perusahaan menggunakan prinsip ini sebagai landasan dalam mewujudkan praktek tata kelola yang baik.

Tata kelola perusahaan dapat membantu membuat struktur spesifik dari distribusi hak dan juga tanggung jawab dari setiap orang yang berbeda didalam sebuah organisasi (seperti komisaris, manajer, pemegang saham dan juga *stakeholder*) dan mematuhi aturan dan juga prosedur dalam proses pengambilan keputusan sehingga keputusan yang

dibuat adalah keputusan yang terbaik yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan dan tentunya kepemilikan yang berbeda dan terpisah.

Hak kekuatan yang dimiliki *stakeholder* secara individual dapat mempengaruhi manajemen. Proses maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak tersebut. Adapun pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan *stakeholder* menerima informasi yang diperlukan seputar kegiatan perusahaan. Praktek dari tata kelola perusahaan menjadi sangat penting untuk dilakukan yang tentunya memiliki efek sangat efektif bagi perusahaan dalam mengarungi pasar di industrinya.

Jika mekanisme ini tidak berjalan dengan baik atau bahkan tidak ada, investor dari luar akan enggan bahkan tidak ingin untuk menghabiskan investasinya pada perusahaan tersebut, yang tentunya akan mengganggu keadaan keuangan perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem tata kelola perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mengikat semua pihak yang berkepentingan, termasuk didalamnya manajemen perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Tata kelola perusahaan pada dasarnya dibutuhkan tidak hanya untuk internal perusahaan tetapi juga oleh pihak eksternal. Hal ini akan berhubungan dengan bagaimana pihak eksternal memperoleh informasi dan jaminan terbaik menangani perusahaan untuk masa yang akan datang.

2.2 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Arguden (2010: 26) mengemukakan hubungan saling kepercayaan perusahaan dengan *stakeholder*-nya bisa dilihat dari prinsip tata kelola perusahaan yang berupa budaya dan iklim dari:

1. Konsistensi (*Consistency*)
2. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
3. Pertanggung Jawaban (*Accountability*)
4. Kewajaran (*Fairness*)
5. Transparansi (*Transparency*)
6. Efektifitas (*Effectiveness*)
7. Menyebar (*Deployed*)

Prinsip ini biasa dikenal dengan singkatan CRAFTED, sesuai dengan penjabaran praktek corporate governance haruslah menyeluruh untuk setiap pihak didalam perusahaan (*deployed*).

Sementara itu FCGI (2015:43) menyatakan prinsip dari tata kelola perusahaan adalah:

1. Hak dari pemegang saham (*The rights of shareholder*), harus diberikan tepat waktu dan memiliki informasi yang benar tentang perusahaan, harus beradaptasi dengan keputusan untuk melakukan perubahan secara fundamental dan siapa saja pemegang saham dari perusahaan.
2. Perlakuan yang sama untuk semua shareholder (*Equitable treatment of shareholders*), terutama untuk pemegang saham

minoritas dan asing dengan memberikan informasi yang utuh dan juga melarang adanya praktek self-dealing dan insider trading.

3. Peran *stakeholder* harus diakui sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum dan secara aktif bekerjasama antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menghasilkan laba, pekerjaan dan keuangan perusahaan yang sehat.
4. Tepat waktu dan akurat serta transparan dalam semua hal yang bersangkutan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.
5. Tanggung jawab dewan dalam manajemen, pengawasan manajemen dan akuntabilitas kepada perusahaan dan pemegang saham.

Lain halnya dengan KNKG (2006:38) yang menyatakan setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan, meliputi:

1. *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Prinsip Dasar Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan

kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Disisi lain Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER — 01 /MBU/2011, prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi:

a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;

- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

2.3 Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme sering diartikan secara sederhana sebagai cara kerja yang dilakukan secara tersistem dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi terjadinya *agency theory* dan juga membantu efisiensi bank yang cenderung akan meningkatkan nilai pasar bank itu sendiri (Caprio Jr, Leuve, dan Levine, 2003:72). Dalam penelitian Shahzad, Zeeshan Fareed, Zulfiqar dan Naeem (2015: 63) mekanisme tata kelola perusahaan secara sederhana terdiri dari *board size*,

komposisi dewan komisaris, komite audit, pertemuan tahunan dan status CEO.

Menurut Josephine dan Joseph (2015: 89) mekanisme tata kelola perusahaan sebagai:

Gambar 2.1

Mekanisme tata kelola perusahaan

Sumber: Josephine dan Joseph (2015)

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Totok (2010:38) bisa dilihat bahwa mekanisme tata kelola perusahaan terdiri dari:

1. Mekanisme Pemantauan Kepemilikan

Struktur kepemilikan dipercaya menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi tata kelola yang baik pada suatu perusahaan. Implementasi praktek tata kelola perusahaan yang baik masih

harus ditingkatkan dikarenakan belum seimbangya persaingan antar bank (Barth, 2002): 154).

a. Kepemilikan Saham Pengendali

Kepemilikan Saham Pengendali (PSP) bisa membantu untuk melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No: 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), Pemegang Saham Pengendali disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:

- Memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
- Memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh limapersen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Kepemilikan Asing

Bank milik asing didominasi kepemilikan sahamnya oleh pihak asing. Dampak dari kepemilikan asing perbankan menurut Syah (2016: 67), (1) Modal yang disumbangkan oleh investor asing meminimalkan biaya fiskal restrukturisasi bank, (2) Bank asing dapat

menawarkan keahlian di bidang manajemen risiko dan budaya yang lebih unggul dari tata kelola perusahaan sehingga bank lebih efisien, dan (3) Kehadiran bank asing mempertinggi persaingan dan mendesak bank-bank lokal untuk memotong biaya dan meningkatkan efisiensi mereka.

c. Kepemilikan pemerintah

Bank dengan kepemilikan pemerintah merupakan bank yang sebagian besar atau keseluruhan sahamnya yang merupakan milik pemerintah pusat ataupun daerah, contohnya adalah Bank Umum Milik Negara (BUMN) dan Bank Milik Pemerintah pada setiap operasionalnya.

Bank Pembangunan Daerah memiliki permodalan yang rendah jika dibandingkan dengan industri perbankan nasional lainnya. Hampir keseluruhan saham bank milik daerah dimiliki oleh pemerintah daerah bersangkutan. Sehingga bank perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat sebagai salah satu kunci pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap operasionalnya.

Disisi lain bank dengan kepemilikan pemerintah pusat akan cenderung mengalami perkembangan kinerja yang lambat tetapi peran pemerintah dapat sangat membantu dalam hal pengendalian, terutama dalam hal konflik kepentingan yang mungkin akan terjadi pada perusahaan (Barth, 2002: 144). Tata

kelola yang baik bisa membantu perusahaan untuk mengurangi kecenderungan terjadinya *agency theory* karena semua hal sudah diatur dalam *policy* yang menetralkan semua pihak.

2. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal

a. Ukuran Dewan Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Tugas dari direksi adalah mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya (KNKG, 2006: 58). Ukuran direksi harus disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri karena banyak penelitian yang mengemukakan bahwa ukuran dari direksi mempengaruhi kinerja perusahaan secara finansial.

b. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan arahan serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (KNKG, 2006). Dewan Komisaris menghadapi masalah paling strategis diperusahaan tetapi tidak boleh ikut serta didalam pengambilan keputusan operasional. Dewan komisaris dalam bisa diminalisir.

c. Komisaris Independen

Komisaris bertanggung jawab dan memiliki kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi

dan memberikan nasehat bilamana diperlukan (KNKG, 2006) dengan tugas utama memperjuangkan kepentingan pemegang saham minoritas Kriteria yang harus dimiliki oleh komisaris independen menurut Surat Edaran BI No.9/12/DPNP adalah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, yakni apabila memperoleh penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau direksi (pengurus) Bank, dari perusahaan yang PSP nya pengurus Bank, dan dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank.
2. Tidak memiliki hubungan kepengurusan, yakni apabila menjadi pengurus pada perusahaan dimana Dewan Komisaris Bank lainnya menjadi pengurus, menjadi pengurus pada perusahaan yang PSP nya pengurus Bank, dan menjadi pengurus atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan PSP Bank.
3. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham yakni apabila menjadi pemegang saham pada perusahaan yang PSP nya adalah pengurus dan/atau PSP Bank, dan/atau menjadi pemegang saham pada perusahaan PSP Bank.
4. Tidak memiliki hubungan bank apabila :
 - Memiliki saham Bank lebih dari 5% dari modal disetor bank
 - Menerima/memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman dari/kepada Bank yang menyebabkan pihak yang

member bantuan, seperti pihak terafiliasi dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan dengan bank (debitur inti dan deposan inti).

3. Mekanisme Pemantuan Regulator

Pengawasan umum dan pelaksanaan perusahaan merupakan hal yang penting untuk diketahui untuk setiap perusahaan. Hal ini sebenarnya menyangkut tentang keamanan, prosedur dan saham, sehingga sebisa mungkin segala praktek *corporate governance* tidak terlibat dengan isu-isu politik negara. Dengan adanya pengawasan dan aturan pelaksanaan ini diharapkan membantu pihak-pihak dalam implementasian tata kelola perusahaan yang baik. Aturan main umum tata kelola perusahaan di Indonesia disimpulkan dalam tabel berikut: untuk diketahui untuk setiap perusahaan. Hal ini sebenarnya menyangkut tentang keamanan, prosedur dan saham, sehingga sebisa mungkin segala praktek *corporate governance* tidak terlibat dengan isu-isu politik negara. Dengan adanya pengawasan dan aturan pelaksanaan ini diharapkan membantu pihak-pihak dalam implementasian tata kelola perusahaan yang baik. Aturan main umum tata kelola perusahaan di Indonesia disimpulkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Public Supervision dan Enforcement Indonesia

No	Gambaran Umum <i>Supervision</i> dan <i>Enforcement</i>	Secara spesifik	Tata kelola perusahaan di Indonesia
1.	Regulator umum utama dalam tata kelola perusahaan	Kunci regulator	OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
2.	Anggaran dan pendanaan dari regulator utama tata kelola perusahaan	Bentuk pendanaan	Umum dan pribadi
		Sumber dana utama	Anggaran Nasional dan biaya-biaya lain yang diatur negara
3.	Berkuasa badan regulator utama tata kelola perusahaan	Pihak bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan komposisi anggota termasuk ketua	Dewan komisaris 9
		Komposisi perwakilan dari pihak spesifik	Pemerintah dan Bank Sentral
4.	Syarat dan pengangkatan	Periode	5

putusan tubuh regulator utama tata kelola perusahaan	<i>Re-Appointment</i>	Sekali
	<i>Appointment</i> dilakukan oleh	Presiden
	Penunjukan oleh konggres	Diperlukan

Sumber: OECD (2013:321)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 mencantumkan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR), CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (PBI, 2008: 55).

4. Mekanisme Pemantauan Pengungkapan

Corporate governance harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat. Diberlakukan pada semua hal material mengenai perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan (EOCD, 2004: 74).

2.4 Manfaat dan Tujuan Tata Kelola Perusahaan

Berangkat dari mekanisme tata kelola perusahaan tersebut, diharapkan penerapan tata kelola perusahaan memiliki manfaat yang bisa dirasakan (FCGI, 2015: 97), yaitu:

- a. Mudah untuk meningkatkan modal perusahaan
- b. Menurunkan biaya modal kontribusi signifikan terhadap anggaran negara.
- c. Peningkatan kinerja bisnis dan meningkatkan kinerja ekonomi.
- d. Berdampak baik pada harga saham (karena situasi Indonesia saat ini yang menerapkan privatisasi perusahaan milik negara yang dapat memberikan Tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan tata kelola perusahaan (Wibowo dkk, 2004:112) adalah :
 1. Memaksimalkan nilai perusahaan, agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, untuk mendukung iklim investasi
 2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara professional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian komisaris, direksi dan RUPS
 3. Mendorong pemegang saham, anggota komisaris dan direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap undang-undang atau ketentuan yang berlaku.
 4. Kesadaran adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

2.5 Pedoman Perilaku *Corporate Governance* pada Perbankan

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia 2006 yang diterbitkan oleh KNKG merupakan pedoman pokok pelaksanaan untuk setiap aspek prinsip *Good Corporate Governance*, berupa:

Tabel 2.2

Pedoman Pokok Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance*

No	Prinsip GCG	Pedoman pokok pelaksanaan
1.	Transparansi	<p>Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya</p> <p>Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan</p> <p>Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak Mengurangi kewajiban untuk memnuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.</p>

		Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan
2.	Akuntabilitas	<p>Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan corporate values, dan strategi perusahaan.</p> <p>Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG</p> <p>Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan</p> <p>Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (<i>reward and punishment system</i>).</p> <p>Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku</p>

		(<i>code of conduct</i>) yang telah disepakati
3.	Responsibilitas	<p>Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan, perundang-undangan, peraturan dasar, dan peraturan perusahaan</p> <p>Perusahaan harus melaksanakan tanggungjawab social dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai</p>
4.	Independensi	<p>Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. □</p> <p>Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.</p>
5.	Kewajaran dan kesetaraan	Perusahaan harus emmberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan

	<p>dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing</p>
	<p>Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan</p>
	<p>Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, <i>gender</i>, dan kondisi fisik.</p>

Sumber: KCGK (2006: 57)

2.6 Kinerja Perbankan

Kinerja dari sebuah perusahaan digambarkan dari bagaimana perusahaan bisa memaksimalkan keuntungan yang didapat, hasil laporan keuangan dan juga ketertarikan dari *shareholder*, berdasarkan pendekatan yang digunakan untuk memaksimalkan *market value*. Laporan keuangan digunakan oleh para *shareholder* untuk melihat kemungkinan masa depan, sedangkan dari sudut pandang manajemen, digunakan untuk membantu mengantisipasi kondisi dimasa depan dan yang lebih penting lagi sebagai titik awal untuk perencanaan strategis yang mempengaruhi masa depan (Brigham,

2001: 97).

Laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan dapat dilihat menggunakan ukuran kualitatif dan juga kuantitatif yang menggambarkan pencapaian yang digunakan perusahaan selama periode tertentu. Untuk industri perbankan biasa menggunakan istilah tingkat kesehatan bank, yaitu hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar (PBI No.6/10/PBI/2004). Penilaian tersebut menggunakan indikator CAMELS, yang terdiri dari:

- a. Permodalan (*capital*) yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen seperti kecukupan, komposisi, dan proyeksi permodalan serta kemampuan permodalan bank dalam mengatasi aset bermasalah
- b. Kualitas aset (*asset quality*) yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen seperti kualitas aset produktif, konsentrasi eksposur resiko kredit, perkembangan aset produktif bermasalah dan kecukupan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP).
- c. Manajemen (*management*) yang terdiri dari penilaian komponen-komponen seperti kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen resiko, kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.
- d. Rentabilitas (*earning*) yang terdiri dari penilaian komponen-komponen

seperti pencapaian *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), tingkat efisiensi bank, perkembangan laba operasional, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya

- e. Likuiditas (*liquidity*) yang terdiri dari penilaian komponen-komponen seperti rasio asset/liabilitas likuid, potensi *maturity mismatch*, kondisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR), proyeksi arus kas, konsentrasi pendanaan, serta kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*Assets and Liabilities Management/ALMA*).
- f. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*) yang terdiri dari penilaian komponen-komponen seperti kemampuan bank dalam mengatasi potensi kerugian akibat fluktuasi suku bunga dan nilai tukar serta kecukupan penerapan manajemen resiko pasar.

Kinerja keuangan sering kali menggunakan rasio yang digunakan untuk menstandarisasi informasi keuangan sehingga menghasilkan perbandingan yang berguna (Martin dkk, 1999: 43). Jadi semua perhitungan merupakan standarisasi untuk setiap rasio. Ada beberapa jenis analisis rasio keuangan, yaitu (Husnan, 2002: 58):

1. Rasio leverage

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. Beberapa rasio yang mungkin digunakan diantaranya:

- a. Rasio hutang

Rasio yang dihitung berdasarkan atas hutang jangka panjang dan total keseluruhan hutang.

b. *Debt to equity ratio*

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang dengan modal sendiri.

c. *Debt service coverage*

Kewajiban finansial yang timbul karena menggunakan hutang tidak hanya karena membayar bunga dan sewa guna (*leasing*).

2. Rasio Likuiditas

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Rasio yang digunakan adalah :

a. Modal kerja neto dengan total aktiva

Perbedaan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar merupakan modal kerja neto, yang menunjukkan potensi cadangan kas perusahaan.

b. *Current Rasio*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva lancar perusahaan bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban lancarnya.

c. *Quick atau Acid Test Ratio*

Persediaan merupakan akun yang paling lama untuk berubah menjadi kas dan tingkat kepastiannya rendah, maka akun persediaan dikeluarkan dari perhitungan

3. Rasio Profitabilitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan dan bisa juga dikaitkan dengan penjualan yang berhasil diciptakan.:

a. Rentabilitas ekonomi

Rasio ini mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasional perusahaan

b. *Return on Equity*

Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri

c. *Return on Investment*

Rasio ini menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan.

d. Perputaran aktiva.

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak penjualan bisa diciptakan dari setiap rupiah aktiva yang dimiliki.

e. Perputaran persediaan

Rasio ini mengukur berapa lama rata-rata barang berada di gudang.

4. Rasio Nilai Pasar

Rasio ini menggunakan angka yang diperoleh dari laporan keuangan dan pasar modal. Beberapa rasio tersebut adalah:

a. *Price Earning Ratio*

Rasio ini membandingkan antara harga saham dan laba per

saham yang diperoleh pemilik perusahaan.

b. *Market to book value ratio*

Merupakan perbandingan harga saham terhadap nilai buku persaham perusahaan.

2.7 Gender Diversity

Isu mengenai *gender diversity* muncul dari semakin banyaknya perempuan yang menduduki posisi strategis pada perusahaan pada abad-21 ini. *Gender diversity* sendiri merupakan keanekaragaman yang timbul dari jumlah perempuan dan laki-laki dengan poin penting *gender equality*. Penelitian Nasir (2015:81) menemukan semakin banyak perempuan sekarang ini diakui dan membuat kemajuan menuju melampaui batasan-batasan silo mengenai *gender* dalam fungsi manajerial tertentu, seperti sumber daya manusia dan komunikasi.

Pandangan mengenai *gender diversity* melihat berbagai keuntungan dan kelemahan yang muncul (Econ, 2012: 56), yaitu:

- a. Adanya perempuan pada posisi strategis dapat memunculkan pemahaman yang lebih dewan komisaris terhadap konsumen potensial dan karyawan yang juga beranekaragam. Hal ini akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk baik mengenai penempatan pasar. Mencocokkan keanekaragaman dari menembus pasar.
- b. Keanekaragam meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam perusahaan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Dewan

komisaris yang beragam mampu menyediakan lebih banyak perspektif, sehingga jumlah alternatif yang muncul dalam mengavaluasi strategi lebih banyak.

- c. Jenis kelamin yang beragam dapat mengeluarkan sinyal positif ke pasar tenaga kerja, produk dan pasar-modal. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat legitimasi perusahaan dan reputasinya.

2.8 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan membedakan besar dan kecilnya perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut perusahaan yang besar cenderung memiliki ruang lingkup yang lebih kompleks. Ukuran perusahaan sendiri bisa diukur menggunakan total penjualan, total aset dan kapitalisasi pasar

Banyak penelitian yang menemukan hubungan yang signifikan antara kinerja perusahaan dan juga ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menggambarkan kekuatan pasar dari perusahaan bersangkutan. Perusahaan yang besar cenderung mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat sehingga pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dibuat secara lebih hati-hati dan akurat. Hal ini merupakan efek domino dari semakin besarnya total aset maka modal yang ditanamkan akan semakin besar, semakin banyak penjualan semakin besar pula perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar, sehingga perusahaan dikenal oleh masyarakat (Sudarmadji dan Sularto, 2007: 85).

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terdapat dalam tabel 2.3 berikut :

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

TABEL 2.3

Tinjauan Penelitian Terdahulu

NO	Nama peneliti	Tahun	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
1.	Farrukh Shahzad, Naveed Ahmed, Zeeshan Fareed, Bushra Zulfiqar dan Faisal Naeem	2015	<i>Corporate Governance Impact on Firm Performance: Evidence from Cement Industry of Pakistan</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Board size</i> b. <i>Board Composition</i> c. <i>CEO status</i> d. <i>Firm performance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya hubungan positif antara kinerja perusahaan dan mekanisme tata kelola perusahaan meskipun <i>board size</i> signifikan, dan <i>board composition</i> tidak secara signifikan mempengaruhi ROA. b. Adanya hubungan negatif antara ROA dan status CEO dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.
2.	Totok Dewayanto	2010	<i>Pengaruh Mekanisme Good</i>	- Pemegang saham pengendali	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemegang Saham Pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah tidak signifikan

		<p><i>Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan Asing - Kepemilikan Pemerintah - Ukuran Dewan Direksi - Ukuran Dewan Komisaris - Komisaris Independen - <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) - Auditor External (<i>Big 4</i>) - Kinerja Perusahaan (ROA) 	<p>berpengaruh terhadap kinerja perbankan</p> <p>b. Ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perbankan</p> <p>c. Ukuran dewan komisaris, komisaris independen, berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan</p> <p>d. Rasio Kecukupan Modal (CAR), eksternal auditor dan ukuran bank memiliki pengaruh positif antara kinerja perusahaan</p>
--	--	---	---	---

3.	Jan Luca Pletzer, Romina Nikolova, Karina Karolina Kedzior, Sven Constantin Voelpel	2015	<i>Does Gender Matter? Female Representation on Corporate Boards and Firm Financial Performance A Meta-Analysis</i>	<p><i>c. Firm performance</i></p> <p><i>d. Female Representation</i></p> <p><i>e. Country development and income</i></p> <p><i>f. Mean board size</i></p>	<p>a. Adanya hubungan positif yang kecil tetapi tidak signifikan pada <i>female representation</i> terhadap kinerja perusahaan</p>
4.	Iszmi Ishak, Ahmad Subhi Muhammad Sidek, Azwan Abdul Rashid	2010	<i>The Effect Of Company Ownership On The Timeliness Of Financial Reporting: Empirical Evidence From Malaysia</i>	<p><i>a. Audit delay</i></p> <p><i>b. Busy audit period</i></p> <p><i>c. Auditor type</i></p> <p><i>d. Audit fees</i></p> <p><i>e. Perbandingan total debt dan total asset</i></p> <p><i>f. Earning per share</i></p> <p><i>g. Pendapatan tahunan</i></p> <p><i>h. Jumlah anak</i></p>	<p>a. <i>Audit delay</i> memiliki hubungan negatif dengan konsentrasi kepemilikan institusi, kepemilikan asing dan keberadaan yang signifikan kepemilikan asing.</p> <p>b. Hanya ditemukan delapan dari tiga belas (<i>audit fee</i>,</p>

			<p>perusahaan diaudit oleh selain</p> <p>i. Ukuran dari komite audit</p> <p>j. Konsentrasi kepemilikan</p> <p>k. Kepemilikan institusional</p> <p>l. Kepemilikan asing</p> <p>m. Keberadaan yang signifikan kepemilikan asing</p>	<p>perbandingan <i>total debt</i> dengan <i>asset</i>, pendapatan tahunan, jumlah anak perusahaan yang diaudit dengan selain auditor utama, konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan asing) variabel yang memperlihatkan hubungan <i>audit delay</i>.</p> <p>c. Hubungan antara audit delay dengan kepemilikan asing tidak signifikan secara statistik.</p>
5.	Karim S. Rebeiz dan Zeina Salameh	2006	<p><i>Relationship between Governance Structure and Financial</i></p>	<p>f. <i>Leadership structure</i> mempengaruhi secara positif terhadap kinerja keuangan perusahaan</p> <p>g. Ukuran direksi, jumlah rapat direksi dan jumlah dewan</p>

			<i>Performance in relation</i>	10. Kinerja keuangan perusahaan	komisaris independen tidak mempengaruhi secara signifikan kinerja keuangan perusahaan
6.	Bernadette Josephine James dan Corina Joseph	2015	<i>Corporate Governance Mechanisms and Bank Performance: Resource-based View</i>	<p>a. Kepemilikan bank</p> <p>b. Dewan komisaris Independen</p> <p>c. Ukuran dewan komisaris</p> <p>d. CAR</p> <p>e. Kinerja keuangan perusahaan</p>	d. Mekanisme regulator secara signifikan mempengaruhi kinerja perbankan
7.	Ienciu Ionel-Alina, Popa Irimie Emilia, Ienciu Nicoleta	2012	<i>Environmental Reporting and Good Practice of</i>	<p>a. Dewan komisaris independen</p> <p>b. Kualitas komite audit</p> <p>c. Ukuran dewan</p>	<p>g. Adanya pengaruh kinerja dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung BOD dalam pengukuran</p>

	Maria		<p><i>Corporate Governance: Petroleum Industry Case Study</i></p>	<p>komisaris</p> <p>d. Adanya wanita yang berada pada dewan komisaris</p> <p>e. <i>Management control system</i></p> <p>f. <i>Financial performance</i></p> <p>g. <i>Non financial performance</i></p>	<p>melaksanakan fungsi mentoring dan memberikan saran untuk sistem strategis keseluruhan manajemen, kontrol akan menghasilkan kinerja bank yang lebih baik</p>
--	-------	--	---	--	--

2.10 Kerangka pemikiran

2.10.1 Keterikatan Variabel Kepemilikan Asing (*Foreign Ownership*) Terhadap Kinerja Perbankan

Kepemilikan asing pada perbankan bisa membantu mempengaruhi manajemen untuk bertidak lebih terbuka, bersaing dan efisien dalam menjalankan strategi (Josephine dan Joseph, 2015:78). Hal tersebut menimbulkan budaya kerja yang berbeda pada perusahaan yang memiliki kepemilikan asing karena mengadopsi beberapa aturan dan budaya asing juga. Adanya kecenderungan tersebut tentu bisa mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya lebih besar lagi, dilakukan dengan cara meningkatnya kemampuan perusahaan untuk mendapatkan *output* yang diinginkan (Josephine dan Joseph, 2015: 63), sehingga disimpulkan sebagai hubungan antara kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan itu adalah nyata.

2.10.2 Keterikatan Variabel Kepemilikan Pemerintah (*Government Ownship*) Terhadap Kinerja Perbankan Baik dengan kepemilikan pemerintah akan cenderung mengalami

Perkembangan kinerja yang lambat tetapi peran pemerintah dapat sangat membantu dalam hal pengendalian, terutama dalam hal konflik kepentingan yang mungkin akan terjadi pada perusahaan (Barth, 2002: 68). Adanya peran kepemilikan pemerintah juga dapat digunakan untuk memecah masalah konflik antara dewan manajemen dan para pemegang saham (Totok, 2010:41).

2.10.3 Keterikatan Variabel Ukuran Direksi Terhadap Kinerja Perbankan

Direksi memiliki tugas untuk menentukan kebijakan yang akan diambil

dalam konsekuensi yang berimbang dalam jangka panjang maupun pendek. Banyak penelitian yang menganalisis pengaruh antara ukuran direksi dan kinerja perusahaan. Shahzad dkk (2015: 49), mengemukakan bahwa adanya hubungan positif antara kinerja perusahaan dan ukuran dari direksi, kinerja perusahaan dihitung menggunakan ROA.

Kecendrungan tersebut juga dijabarkan oleh Alina dkk (2012: 52) yang mengemukakan bahwa ukuran direksi dapat membantu dalam proses perumusan kebijakan karena setiap anggota direksi memiliki pengalaman yang berbeda.

2.10.4 Keterikatan Variabel Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Perbankan

Terbatasnya ukuran dewan komisaris biasanya dihubungkan dengan kekayaan pengetahuan setiap individu didalam sebuah *board* terhadap pengawasan dan saran yang akan diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris berjumlah 6 sampai 15 orang cenderung memiliki keuntungan yang lebih tinggi untuk *value* dan pendapatan bersih daripada perusahaan dengan ukuran dewan komisarisnya berbeda (Shahzad dkk, 2015:51).

2.10.5 Keterikatan Variabel Komisaris Independen (*Board Independence*) Terhadap Kinerja Perbankan

Komisaris independen dibutuhkan untuk mengendalikan dan melakukan evaluasi pada perusahaan, mereka juga ditertimbangkan sebagai

“*decision specialist*” (Shahzad dkk, 2015:53). Hal ini disebabkan karena komisaris independen tidak memiliki hubungan apapun terhadap kepemilikan saham ataupun hubungan keluarga dan benar-benar merupakan fungsional yang menjadi penengah didalam berbagai permasalahan yang muncul.

tidak terbatas.

Josephine dan Joseph (2015: 52) juga mengemukakan bahwa adanya hubungan positif antara komisaris dan kinerja perbankan karena adanya komisaris independen dapat memberikan informasi yang lebih luas karena *network* yang dimiliki olehnya.

2.10.6 Keterikatan Variabel CAR Terhadap Kinerja Perbankan

Capital Adequacy Ratio merupakan regulasi yang diterapkan pada semua perbankan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR). Modal disini digunakan untuk meminimalisir kegagalan bank dalam menghadapi kebangkrutan (Josephine dkk, 2015:78). Berangkat dari hal diatas Totok (2010:45), melihat adanya hubungan positif antara CAR kinerja pada perbankan.

2.10.7 Keterikatan Variabel *Gender Diversity* Mempengaruhi Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perbankan

Banyak penelitian sekarang ini yang memperdebatkan tentang representasi wanita didalam sebuah perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh pemikiran yang kuno menganggap wanita cenderung menggunakan perasaan ketika bertindak sehingga ditakutkan hal tersebut mempengaruhi

dalam kinerja. Penelitian yang berjudul “*Does Gender Matter? Female Representation on Corporate Boards and Firm Financial Performance – A Meta-Analysis*” menemukan bahwa hubungan antara keberanekaragaman *board* tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Sehingga semestinya setiap kali adanya promosi jabatan atau kesempatan untuk menduduki suatu posisi tidak ada alasan untuk tidak mengikutsertakan wanita yang memiliki kualifikasi yang disyaratkan

2.10.8 Keterikatan Variabel Ukuran Perusahaan Mempengaruhi Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perbankan

Ukuran bank di-*proxy*-kan oleh total aset. Banyak penelitian yang menjadikan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol tetapi peneliti mencoba melihat lebih jauh lagi hubungan moderasi dari ukuran perusahaan terhadap mekanisme tata kelola dan kinerja bank. Penelitian yang dilakukan oleh Totok (2010: 44) menemukan adanya hubungan signifikan antara ukuran perusahaan terhadap kinerjanya. Dijelaskan bahwa bank yang memiliki ukuran yang besar biasanya memiliki masalah keagenan yang lebih besar sehingga fungsi pengawasan yang lebih banyak dengan menambah jumlah dewan komisaris dan komisaris independen. Sehingga perusahaan memperoleh kemudahan dalam mengakses pasar modal, yang berarti perusahaan memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk mendapatkan dana.

Dalam penelitian ini menggunakan variabel yang terdiri dari variabel dependen, independen dan juga variabel moderator yang di-*proxy*-kan sebagai kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran direksi, ukuran

dewan komisaris, dewan komisaris independen, CAR, ROE, *gender diversity* dan ukuran perusahaan.

Gambar 2.2

Kerangka pemikiran penelitian

2.11 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian teori dan kerangka pemikiran penelitian maka peneliti menarik beberapa hipotesis dalam menguji hubungan masing-masing variabel sebagai berikut:

- H1: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan

- H2: Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan
- H3: Ukuran direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan
- H4: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan
- H5: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan
- H6: CAR berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan
- H7: *Gender Diversity* berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan
- H8: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODA PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif, penelitian terhadap data berupa fakta keuangan perusahaan yang diperoleh berdasarkan survei dengan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan sudah diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi (Sekaran, 2006: 40).

3.2 Variabel Penelitian

Penelitian ini menguji variabel yang terdiri dari enam variabel bebas (independen), dan satu variabel terikat (dependen). Variabel independen dalam penelitian adalah uraian dari mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, yaitu mekanisme pemantauan kepemilikan (kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah), mekanisme pemantauan control internal (ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan komisaris independen). Sementara itu, variabel dependen adalah kinerja perusahaan perbankan yang diwakili dengan perhitungan ROE dan untuk variabel moderator menggunakan ukuran bank yang di-proxy-kan dengan total aset dan keanekaragaman pada dewan komisaris berdasarkan jenis kelamin.

3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang

positif ataupun yang negatif bagi variabel dependen (Kuncoro, 2009: 57).

Dalam penelitian ini memiliki beberapa variabel independen, yaitu:

h. Kepemilikan asing

Kepemilikan asing merupakan variabel dummy sehingga jika perusahaan memiliki kepemilikan asing sebesar 5% atau lebih maka dinilai 1 sedangkan jika tidak nilainya adalah 0.

i. Kepemilikan pemerintah

Kepemilikan asing merupakan variabel dummy sehingga jika perusahaan memiliki kepemilikan pemerintah sebesar 5% atau lebih maka dinilai 1 sedangkan jika tidak nilainya adalah 0.

j. Ukuran dewan direksi

Ukuran dewan direksi adalah Jumlah anggota dewan direksi yang ada dalam perusahaan. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.

k. Ukuran dewan komisaris

Menurut OJK (2014), sekurang-kurangnya dewan komisaris berjumlah 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Paling kurang 1 orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili di Indonesia

l. Komisaris independen

Rasio persentase antara jumlah komisaris yang berasal dari luar

perusahaan (komisaris independen) terhadap total jumlah anggota dewan komisaris perusahaan.

3.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan kinerja perbankan. Pada penelitian ini mencoba untuk melihat hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan perbankan. Variabel kinerja perbankan di-*proxy*-kan dengan menggunakan ROE yang dimiliki setiap perusahaan yang dapat dilihat dalam laporan tahunan secara *annual*.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pada tahun 2015-2016 yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan menggunakan sampel bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2015. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sampel yang bisa mewakili sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut :

- e. Merupakan perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015-2016.
- f. Masih beroperasi hingga tahun 2016
- g. Bank mempublikasikan *annual report* dan/atau *financial report* untuk periode 31 Desember 2015-2016 di dalam website IDX atau perusahaan bersangkutan.

- h. Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance*, struktur kepemilikan dan rasio keuangan dalam laporan tahunan bank.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 2015-2016 terdaftar 100 sampel penelitian (30 perusahaan perbankan). Berdasarkan kriteria sampel diatas, penelitian akhirnya menggunakan 40 sampel penelitian (11 perusahaan perbankan).

Tabel 3.1

Pemilihan sampel penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2016	30
Perusahaan yang tidak masuk sebagai sampel: (pengurangan)	
1. Tidak mempublikasikan dan/atau di- <i>delisting</i> periode 2015	8
2. Tidak mempublikasikan dan/atau di- <i>delisting</i> periode 2016	11
Total sampel penelitian	11

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data sekunder dan data panel. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti, berupa data yang telah diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya dan informasi yang tersedia dari sumber publikasi ataupun nonpublikasi entah di dalam atau luar organisasi (Sekaran, 2006: 38).

Sedangkan yang dimaksud data panel adalah gabungan dari data *time series* (antar waktu) dan *data cross section* (antar individu/ruang). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) dan *financial report* perusahaan perbankan yang tersedia di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2016 yang dapat dilihat pada situs resmi www.idx.co.id, Indonesia *Capital Market Directory* (ICMD) dan website masing-masing perbankan periode 2015-2016.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data-data yang berasal dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.

Pemilihan rentang waktu 2015-2016 mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi sektor jasa keuangan sesuai dengan UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang menyebutkan bahwa OJK merupakan lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang independen dan bebas dari campur tangan lembaga lain.
- b. Pada 22 November 2012, UU No 21 tentang OJK disahkan dan berfungsi tanggal 31 Desember 2012 yang menggantikan fungsi,

tugas dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

- c. Tahun 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia (BI) juga dialihkan ke OJK.

Oleh karena industri perbankan sudah diawasi secara independen oleh OJK, maka diharapkan semua perbankan Indonesia sudah menjalankan prosedur sesuai aturan sehingga hasil penelitian yang diperoleh akan maksimal. Sehingga periode waktu 2015-2016 dianggap sebagai titik balik setiap perusahaan menjadikan isu tata kelola perusahaan sebagai prioritas dalam dunia perbankan.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian. Secara lebih rinci, operasionalisasi variabel penelitian adalah sebagai berikut pada tabel 3.2

Tabel Tabel 3.2
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Konsep Variabel/Dimensi	Indicator	Skala	Sumber
1. Variabel Independen				
Kepemilikan asing	Porsi outstanding share yang dimiliki oleh investor atau pemodal asing (foreign investor) terhadap jumlah seluruh modal saham yang beredar	Memiliki kepemilikan 5% atau lebih	Nominal	Josephine James dan Corina Joseph (2015) Totok Dewayanto (2010)
Kepemilikan pemerintah	Jumlah kepemilikan saham oleh pihak pemerintah (government) dari seluruh modal saham yang dikelola	Memiliki kepemilikan pemerintah sebesar 5% atau lebih	Nominal	Totok Dewayanto (2010)
Ukuran dewan direksi	Jumlah anggota dewan direksi yang ada dalam perusahaan	Jumlah dari total direksi pada	Interval	Farrukh Shahzad, et al (2015)

		perusahaan		Jan Luca Pletzer, et al (2015) Josephine James dan Corina Joseph (2015) Totok Dewayanto (2010)
Ukuran dewan komisaris	Jumlah anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab mengawasi perusahaan baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan	Jumlah dari total dewan komisaris pada perusahaan	Interval	Totok Dewayanto (2010)
Komisaris independen	Rasio prosentase antara jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan (komisaris independen) terhadap total jumlah anggota dewan komisaris perusahaan	Jumlah dari dewan komisaris independen pada perusahaan	Rasio	Karim S. Rebeiz and Zeina Salameh (2006) Josephine James dan Corina Joseph (2015) Totok Dewayanto (2010)

<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	Proporsi modal sendiri dibandingkan dengan dana luar didalam pembiayaan kegiatan usaha perbankan	Nilai rasio kecukupan modal bank	Rasio	Josephine James dan Corina Joseph (2015) Totok Dewayanto (2010)
2. Variabel Dependen				
KINERJA PERUSAHAAN	Indikator untuk mengukur tingkat pengembalian investasi pemegang saham	Laba setelah pajak Total ekuitas	Rasio	Cahyani Nuswandari (2009)
3. Variabel Moderator				
<i>Gender Diversity</i>	Perbandingan jumlah wanita dan pria dalam dewan komisaris	Jumlah wanita yang duduk pada direksi perusahaan dibandingkan dengan total dewan komisaris	Rasio	Jan Luca Pletzer, et al (2015) Harald Dale-Olsen, Pa I Schone and Mette Verner (2012)

<i>Ukuran perusahaan</i>	Jumlah dari semua investasi bruto, kas dan setara kas, piutang dan aset lainnya disajikan pada neraca pada laporan keuangan	Logaritma natural dari total <i>asset</i> yang dimiliki bank	Rasio	Totok (2010) Dewayanto
--------------------------	---	--	-------	-------------------------------

Widya Wiwaha
 Jangan Plagiat

3.7 Teknik Analisis Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dengan kinerja keuangan perusahaan. Dalam pengolahan data peneliti menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik yang dikenal dengan SPSS. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Model data ini kemudian diestimasi dengan menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)*.

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Gozali, 2007:39).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

f. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*. Kedua hal tersebut menunjukkan akan menjelaskan variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya (Ghozali, 2007: 33).

g. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson (DW test)*, yaitu menghitung jumlah selisih kuadrat nilai tafsiran faktor gangguan yang berurutan (Ghozali, 2007: 40). Kriteria pengujian dengan hipotesis tidak ada autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No desicion</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No desicion</i>	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4-du$

Sumber: Ghozali (2007: 43)

h. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas bisa diketahui melalui uji Park dan uji Glejser, yaitu dengan melakukan analisis regresi variabel independen terhadap nilai absolut residual (Ghozali, 2007: 43).

i. Uji Asumsi Normal

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi distribusi normal. Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2007:43).

3.7.3 Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk mendapatkan koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan (Ghozali, 2007: 44).

Persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan

$$ROE_{ik} = \alpha + \beta_1 FOR_{it} + \beta_2 GOV_{it} + \beta_3 BOD_{it} + \beta_4 BOC_{it} + \beta_5 INDB_{it} + \beta_6 CAR_{it} + e_k$$

2. Keterikatan *gendre diversity* mempengaruhi mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan

$$ROE_{ik} = \alpha + \beta_1 FOR_{it} + \beta_2 GOV_{it} + \beta_3 BOD_{it} + \beta_4 BOC_{it} + \beta_5 INDB_{it} +$$

$$\beta_6 CAR + \beta_7 DIV \times FOR_{it} + \beta_8 DIV \times GOV_{it} + \beta_9 DIV \times BOD_{it} + \beta_{10} DIV \times BOC_{it} + \beta_{11} DIV \times INDB_{it} + e \beta_{12} CAR \times DIV_{it} + ek$$

3. Keterkaitan ukuran variabel perusahaan mempengaruhi mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan.

$$ROE_{ik} = \alpha + \beta_1 FOR_{it} + \beta_2 GOV_{it} + \beta_3 BOD_{it} + \beta_4 BOC_{it} + \beta_5 INDB_{it} + \beta_6 CAR + \beta_7 SIZE \times FOR_{it} + \beta_8 SIZE \times GOV_{it} + \beta_9 SIZE \times BOD_{it} + \beta_{10} SIZE \times BOC_{it} + \beta_{11} SIZE \times INDB_{it} + e \beta_{12} SIZE \times CAR_{it} + ek$$

untuk I = Time = 1,2,3,...,n dan k = 1,2,3,...,n

Keterangan :

K = Banking Firm

ROE = Kinerja Perusahaan diukur menggunakan ROE

FOR = Kepemilikan Asing

GOV = Kepemilikan Pemerintah

BOD = Ukuran Dewan Direksi

BOC = Ukuran Dewan Komisaris pada Bank

IND = Komisaris Independen

CAR = *Capital Adequacy Ratio*

DIV = Gender Diversity

SIZE = Ukuran Perusahaan

E = *Random error*

= *Parameters to be estimated*

= Konstanta

3.7.4 Pengujian Hipotesis

Perhitungan secara statistik disebut signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2007:51). Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2007: 51).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendaknya diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan Nol, atau $H_0 : \beta_1 = \beta_2 \dots \dots = \beta_k = 0$, untuk hipotesis alternatif (H_A) tidak semua parameter secara simultan sama

dengan nol, atau $H_A : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \neq \beta_k \neq 0$.

Untuk melakukan uji hipotesis bisa mengambil keputusan dengan kriteria sebagai berikut (Ghozali, 2007: 66):

1. Bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel.
3. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A .

c. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. H_0 yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter β_1 sama dengan nol, atau $H_0 : \beta_1 = 0$ artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. H_A parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau $H_A : \beta_1 \neq 0$ artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Cara melakukan uji t sebagai berikut (Ghozali, 2007: 66):

1. Bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan

derajat kepercayaan sebesar 5% maka H_0 yang menyatakan $\beta_1=0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut), dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen

2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel.

Kriteria pengujian signifikansi koefisien regresi sebagai berikut

- H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, dengan demikian secara individu tidak ada pengaruh yang signifikan dari X_1, X_2, X_3 terhadap Y .
- H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, dengan demikian secara individu ada pengaruh yang signifikan dari X_1, X_2, X_3 terhadap Y .

DAFTAR PUSTAKA

- Argüden, Dr. Yulmaz. 2010. *Asian Development Bank*. 2014. *Measuring the effectiveness of Corporate Governance*.
- Alina, Ienciu Ionel. 2012. *Environmental Reporting and Good Practice of Corporate Governance: Petroleum Industry Case Study Asean Corporate Governance Scorecard Country Reports And Assessments 2013–2014*. Thailand.
- Badan Usaha Milik Negara. *Peraturan Menteri Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara*, Jakarta.
- Bank Indonesia. 2004. *Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*, Jakarta.
- _____. 2006. *Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum*, Jakarta.
- _____. 2007. *Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*, Jakarta.
- _____. 2008. *Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*, Jakarta.
- _____. 2010. *Peraturan Bank Indonesia No: 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)*, Jakarta
- Barth, James R., G. Caprio, Jr., and R. Levine. 2002. “*Banking system around the Global: Do regional and Ownership Affect Performance and Stablitiy?*”.
- Februari. Berger, A. N. dan Bouwman C. H. S. 2013. *How does capital effect bank performance during financial crises?*
- BPKP. 2015. www.bpkp.go.id
- Brigham, Eugene dan Joel F Houston, 2001. *Manajemen Keuangan II*. Jakarta:Salemba Empat.
- Caprio, G., L. Leuven., R. Levine. 2003. *Governance and Bank Valuation, Working Paper No. 10158*, National Bure of Economic Research.
- Dewayanto, Totok. 2010. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional* (Studi pada Perusahaan Perbankanyang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008).

- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Husnan, Suad DR. MBA., dan Dra. Enny Pudjiastuti, MBA., Akt. 2004. Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Faridah, Hana. 2010. *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Untuk Mengelola Risiko Perbankan* (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang). Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Forum for Corporate in Indonesia. 2015. www.fcgi.or.id
- Jao, Robert dan Gagaring Pagalung. 2014. *Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Indonesia*.
- Josephine, James Bernadette dan Corina. 2015. *Corporate Governance Mechanisms and Bank Performance: Resource-based View*.
- Keputusan Menteri BUMN Nomor kep-117/M-MBU/2002 pasal 1 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jakarta.
- Komite National Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Liang, Q., Xu, P., dan Jiraporn P. 2013. *Board Characteristics and Chinese Bank Performance*.
- Martin, John D, dkk. 1999. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Edisi Kelima. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Matud MP. 2004. *Gender differences in stress and coping styles. Personality and Individual Differences*.
- Nazir, Rudaba Z. 2015. *Consolidating Gains: Gender Diversity in Business Leadership*. Nuswandari, Cahyani. 2009. *Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Vol 16, September.
- Organisation for Economic Co-Operation and Development. 2004. *OECD Principles of Corporate Governance*. Paris.

- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Booklet Perbankan Indonesia 2014*. Jakarta.
_____. 2014. Siaran Pers No.SP-41/DKNS/OJK/11/2014. *Press Release Risk and Governance Summit 2014 Passion to Governance: Implementing Strategy into Action* . Jakarta.
- Pletzer, Jan Luca, dkk. 2015. *Does Gender Matter? Female Representation on Corporate Boards and Firm Financial Performance - A Meta-Analysis*.
- Post C, Byron K. 2014. *Women on boards and firm financial performance: A meta- analysis*.
- Rebeiz, Karim S. dan Zeina Salameh. 2006. *Relationship between Governance Structure and Financial Performance in Construction*.
- Republik Indonesia. 1998. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 Tentang Perbankan*, Jakarta.
_____. 2011. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi I. Jakarta: Salemba Empat.
- Shahzad, Farrukh, dkk. 2015. *Corporate Governancce Impact on Firm Perofmance: Evidance from Cement Industry of Pakistan*. Vol:90.
- Shehu, Aliyu Nurraddeen, dkk. 2014. *The Mediating Role of Management Control System in The Relationship Between Corporate Governance and The Performance of Bailed-out Bank in Nigeria. Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan*.
- Sudarmadji, Ardi Murdoko dan Lana Sularto, 2007. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Perusahaan*. Diakses 23 February 2016. www.academia.edu